

PENINGKATAN PERAN AUDITOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD

Mimin Nur Aisyah

Abstract

Since the bankruptcy cases of several big companies that involve their auditors in the accounting scandal, this profession get strong pressure to improve their performance. Sarbanes Oxley Act of 2002 contains a comprehensive rule about corporate governance. It will increase the number of charges to white collar criminals.

Fraud in the company is management's responsibility, but auditors also have the responsibility to find and disclose it by make a plan and audit work to get a reasonable assurance whether financial statement free from material misstatement, neither caused by error nor by irregularities. The evaluation of organizational condition, company's structure and choices made is expected to help disclosing the motivation, opportunity and rationalization beyond the fraud of financial statement.

While the management should create a condusive environment in the company to avoid the occurrence of fraud arises from motivation and opportunities, auditors should improve their competence, especially in fraud detection, by a strategic reasoning in audit risk valuation, audit planning and audit working. Strategic reasoning will be more challenging by the existence of strategic dependence in which the level of auditor's expectation on manager's action is affecting manager's action.

PENDAHULUAN

Skandal Enron Corporation, WorldCom dan sejumlah perusahaan besar dunia lainnya telah menyita perhatian banyak pihak. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut telah menyebabkan kerugian jutaan dollar bagi investor dan kreditur. Kasus ini juga menyeret beberapa kantor akuntan publik terbesar di dunia ke dalam penyelidikan pengadilan atas dugaan perannya dalam skandal-skandal akuntansi yang terjadi.

Sebagai tanggapan atas kerugian besar yang dialami investor, pada tanggal 30 Juli 2002, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *Sarbanes Oxley Act of 2002*, sebuah aturan yang dianggap sebagai hukum federal Amerika Serikat yang paling

komprehensif terkait dengan *corporate governance*. Aturan baru ini mengharuskan CEO dan CFO perusahaan publik untuk menyiapkan sebuah pernyataan yang melengkapi laporan audit, yaitu yang menyatakan kelayakan laporan keuangan dan pengungkapan yang terdapat dalam laporan periodik, dan bahwa laporan keuangan dan pengungkapan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, pengoperasian dan kondisi keuangan dari perusahaan yang menerbitkannya.

Lebih lanjut, masing-masing laporan keuangan harus berisi “laporan pengendalian internal” yang akan: (1) menyatakan tanggung jawab manajemen untuk membuat dan memelihara struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa laporan keuangan secara material telah disajikan dengan tepat; dan (2) berisi penilaian tentang efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal. Peraturan ini juga menetapkan badan pengawas publik, yaitu Public Company Accounting Oversight Board, yang terdiri dari dua akuntan publik bersertifikasi dan tiga personil non akuntan yang memiliki pengetahuan tentang keuangan. SEC, Chairman of Federal Reserve Board dan Secretary of the Treasury bersama-sama bertanggungjawab atas penunjukan anggota Oversight Board. Peraturan ini juga menambah jumlah pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai kejahatan perusahaan dan memperketat hukuman yang dikenakan. Hal ini nampaknya akan meningkatkan jumlah tuntutan terhadap pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

KECURANGAN (FRAUD)

Menurut Merriam Webster’s Dictionary of Law (1996) seperti dikutip dalam Viton (2003), definisi fraud adalah:

“Any act, expression, omission, or concealment calculated to deceive another to his or her disadvantage, specifically, a misrepresentation or concealment with reference to some fact material to a transaction that is made with knowledge of its falsity or in reckless disregard of its truth or falsity and with the intent to deceive another and that is reasonably relied on by the other who is injured thereby”.

Sedangkan pengertian kecurangan (fraud) menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Vanasco (1998) dan Halim (2003) adalah:

“All multifariators means which human ingenuity can devise, and which resorted by one individual to get advantage over another by false suggestions or suppression of the truth,

and includes all surprise, trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another cheated”.

Menurut ACFE ini, kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara luhai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain. AICPA dan IAI tidak membedakan secara jelas apakah kecurangan tersebut merupakan kesalahan yang berakibat salah saji material atau tidak, yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mendasari alasan kecurangan, yaitu tindakan yang mendasari salah saji material (*misstatement*) apabila disengaja. Oleh karenanya, ketidakmampuan dan buruknya manajemen tidak termasuk penipuan. Keinginan menipu untuk keuntungan pribadi dan kerugian untuk pihak yang mengandalkan kebenaran bukti nyata transaksi merupakan elemen terpenting penipuan.

MACAM FRAUD

Seperti disebutkan oleh Halim (2003), SAS no. 82, *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*, mengungkapkan setidaknya terdapat dua macam fraud, yaitu *fraudulent financial reporting* dan *misappropriation of assets*. IAI (2001) menjelaskan dalam SPAP seksi 316 menyatakan hal serupa, yaitu:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya. Hal ini seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

Karpoff dan Lott (1993), sebagaimana terdapat dalam Uzun et al (2004), memperkenalkan empat jenis fraud, yaitu:

1. *Fraud of stakeholder*: terjadi jika perusahaan bertindak curang terhadap kontrak yang bersifat eksplisit maupun implicit dengan *supplier*, karyawan, *franchisees*, atau *customer* selain pemerintah.
2. *Fraud of government*: terjadi jika perusahaan melakukan kecurangan dalam kontrak implisif maupun eksplisit dengan sebuah badan pemerintahan.

3. *Fraud of financial reporting*: terjadi jika agen dalam perusahaan salah dalam menyajikan kondisi keuangan perusahaan.
4. *Regulatory violations*: meliputi pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan badan pemerintah.

Adapun menurut Viton (2003), ada tiga macam penipuan di tempat kerja, antara lain: (1) kecurangan manajemen; (2) kecurangan dalam pekerjaan; dan (3) korupsi.

1. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)

Kecurangan manajemen yang terjadi pada jajaran atas perusahaan merupakan kecurangan yang menghasilkan kerugian terbesar. Kecurangan ini melibatkan salah saji laporan keuangan yang disengaja untuk melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik dari yang sebenarnya.

Rezaee menyatakan bahwa penilaian kondisi organisasi, struktur perusahaan dan pilihan yang dibuat dapat membantu mengungkapkan motivasi, peluang, dan rasionalisasi di balik terjadinya kecurangan laporan keuangan.

- Motivasi dan tekanan untuk terlibat dalam kecurangan laporan keuangan dinyatakan sebagai **kondisi** (*condition*). Tekanan perusahaan untuk memenuhi perkiraan laba yang dibuat analisis memainkan peran penting dalam terjadinya kecurangan jenis ini.
- **Struktur perusahaan** (*corporate structure*) dapat menciptakan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Karena manajemen biasanya merupakan pelaku kecurangan, maka tidak mengherankan jika kejahatan ini biasanya terjadi di lingkungan yang ditandai oleh *corporate governance* yang tidak bertanggung jawab dan tidak efektif.
- Manajemen harus membuat **pilihan** (*choices*) antara menggunakan strategi etika bisnis untuk mencapai peningkatan berlanjutan dalam kualitas maupun kualitas laba dengan melakukan pola *earning management* untuk menunjukkan stabilitas maupun pertumbuhan laba. Anggota manajemen mungkin akan memilih untuk melakukan kecurangan laporan keuangan jika: (1) kemakmuran pribadi mereka berhubungan erat dengan kinerja perusahaan; (2) mereka bersedia mengambil risiko pribadi untuk keuntungan pribadi; (3) adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan; (4) adanya tekanan yang besar dari pihak internal maupun eksternal untuk menciptakan atau memaksimalkan

kemakmuran shareholders dan (5) kemungkinan kecurangan dapat dideteksi dianggap sangat rendah.

Keberadaan salah satu dari 3 Cs dapat menjadi tanda kemungkinan terjadinya kecurangan, sementara kombinasi dari dua faktor atau lebih meningkatkan kemungkinan telah terjadi kecurangan tersebut.

Dalam Kaplan (2004), sebuah penelitian menyimpulkan bahwa pengauditan modern terlalu berfokus pada sistem informasi yang digunakan klien untuk menghasilkan informasi keuangan dan justru kurang memperhatikan pengujian langsung terhadap transaksi yang terjadi. Salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan yang curang merupakan salah saji yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Sumber dari salah saji ini meliputi manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, salah saji atau penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan, dan/atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Kecurangan semacam ini nampaknya di luar lingkup (atau motivasi) karyawan tingkat bawah, namun justru ada pada manajemen tingkat atas dan berada di luar sistem pengendalian internal. Oleh karenanya diharapkan standar audit dapat melihat dengan jelas di area mana kecurangan akuntansi sering terjadi.

Kesalahan dalam laporan keuangan dapat terjadi pada neraca, laporan rugi laba, maupun keduanya. Area yang paling sering menjadi subjek penyimpangan adalah: pengukuran dan pengakuan pendapatan, cadangan/perkiraan untuk biaya masa datang yang belum jelas, penilaian aset dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus.

✓ Pengukuran dan pengakuan pendapatan

Sering kali penilaian atas pengakuan diperlukan ketika kerja yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dilakukan selama beberapa periode akuntansi, misalnya: kontrak, garansi, dan kegiatan berlangganan. Penilaian terhadap pengukuran diperlukan ketika kemungkinan untuk mengumpulkan pembayaran pada waktu penyelesaian transaksi masih diragukan atau saat perusahaan bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

✓ Cadangan/Perkiraan untuk biaya masa datang yang belum jelas

Perusahaan diminta untuk membuat perkiraan untuk pengeluaran seperti piutang tak tertagih, keusangan sediaan, depresiasi dan amortisasi aset,

pengembalian produk, diskonto dan utang kontijensi yang jumlahnya mungkin tidak dapat diukur dengan pasti. Perkiraan ini bertujuan untuk menyajikan kepada pembaca informasi keuangan posisi ekonomi sebenarnya perusahaan tersebut. Namun, perkiraan ini dapat disajikan secara *overstated* atau *understated* jika terjadi *earning management*. *Earning management* dilakukan untuk “memuluskan” aliran laba. Perkiraan disajikan secara lebih saji untuk menutupi kelebihan pendapatan pada saat *boom* dan disajikan secara kurang saji untuk menutupi kerugian pada saat ekonomi lesu.

✓ Penilaian aset

Aset tetap dan tidak berwujud adalah rekening neraca yang rentan untuk dinyatakan secara salah saji untuk tujuan kecurangan dalam bentuk pengembungan nilai aset atau pengelolaan laba untuk meningkatkan atau mengurangi pengeluaran yang tercatat untuk depresiasi dan amortisasi. Ketentuan akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset tetap dan tidak berwujud pada nilai historis dan mengurangi nilainya melalui depresiasi atau amortisasi sesuai dengan estimasi umur ekonomis aset tersebut. Pemilihan satu metode terhadap metode lainnya tidak dianggap sebagai kecurangan, kecuali manajemen memiliki maksud untuk menyatakan aset secara lebih saji atau menyajikan laba secara lebih atau kurang saji.

✓ Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus

Pengungkapan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus bervariasi sesuai dengan lingkungan peraturan dan kebijakan perusahaan. Pihak yang memiliki hubungan khusus termasuk di dalamnya perusahaan induk atau anak, manajemen perusahaan, pemegang saham, direktur, pemberi pinjaman, *vendor* dan *customer*. Transaksi semacam itu dapat digunakan untuk menutupi laba yang tidak dilaporkan atau digelapkan, menyembunyikan bukti *earning management*, dan untuk menghindari pengungkapan usaha untuk memperkaya beberapa bagian manajemen atau pemegang saham.

2. Kecurangan dalam Pekerjaan (*Occupational Fraud*)

Meskipun kecurangan dalam pekerjaan dapat dilakukan oleh manajemen, namun kecurangan jenis ini lebih sering dilakukan oleh karyawan. Ada dua macam pendekatan teoretis terkait dengan hal ini, yaitu:

- Hollinger dan Clark menghubungkan kecenderungan terlibat dalam kecurangan dengan ketidakpuasan kerja. Diteorikan bahwa karyawan yang tidak puas (khususnya mereka yang merasa bahwa mereka tidak digaji sesuai dengan apa yang diharapkan) akan mencari “gaji dalam berbagai bentuk” dan akan mencuri untuk “menyeimbangkan neraca”.
- Adanya *Fraud Triangle* yang ditemukan dalam penelitian Cressey (1940). Kecurangan dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni tekanan keuangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan dan mereka dapat melakukan pembelaan (rasionalisasi) bahwa pelanggaran yang dilakukan bukan suatu perbuatan kriminal.



Berikut ini adalah berbagai metodologi yang digunakan untuk melakukan kecurangan:

- *Billing Schemess*. Karyawan mengajukan faktur kepada perusahaan atas suatu pembayaran yang tidak seharusnya ia terima.
- *Skimming*. Skimming terjadi ketika karyawan mencuri pendapatan yang masuk. Target utama skimming adalah pendapatan, pengembalian dana dan piutang usaha.
- *Check tampering*. Check tampering dipengaruhi oleh dua metode: (1) *forged marker*: karyawan memalsukan tanda tangan personil yang mempunyai otoritas untuk itu; (2) *forged endorsement*: karyawan menahan cek yang akan dibayarkan ke pihak lain, mengesahkannya dengan nama pihak yang dibayar, dan jika perlu mempersiapkan pengesahan kedua; (3) *altered payee*: karyawan memasukkan namanya, nama kaki tangan atau nama perusahaan fiktif dan menggunakan cek tersebut untuk keperluan pribadinya; (4) *altered payment amount*: perubahan nilai cek yang diserahkan kepada karyawan untuk meningkatkan jumlah pembayaran

- *Payroll Schemes*. Praktik payroll scheme yang sering dijumpai antara lain: (1) *ghost employee*: cek dibayarkan untuk karyawan fiktif yang tidak bekerja di perusahaan; (2) jam/tingkat pembayaran yang dipalsukan; dan (3) *commission schemes*: karyawan yang curang melaporkan penjualan fiktif untuk memperoleh komisi atau dengan meningkatkan tingkat komisinya.
- *Non cash misappropriations*. Pencurian aset perusahaan umumnya meliputi hal-hal berikut: (1) *larceny*: pencurian aset tanpa ada usaha penyembunyian oleh pelaku; (2) *asset requisition and transfer scheme*: aset hilang pada saat pemindahan aset ke lokasi lain; (3) *purchasing and receiving scheme*: memindahkan sebagian barang yang masuk namun melaporkan kepada vendor dan perusahaan masing-masing dengan laporan yang berbeda; (4) *false shipment schemes*: karyawan yang curang mencatat penjualan fiktif dan mencuri produk yang “dijual”.

3. Korupsi (*Corruption*)

Meskipun frekuensi terjadinya korupsi di perusahaan ini relatif lebih kecil, namun total kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Aktivitas yang termasuk korupsi meliputi penyuapan, *kickbacks*, kecurangan kontrak, pemerasan, serta pembayaran dan penerimaan persenan illegal.

Secara khusus, kecurangan terhadap kontrak dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat memperoleh kontrak dan kemudian menipu korban. Selama proses penawaran, kontraktor yang memiliki kaki tangan dalam perusahaan dapat membuat proses lebih mudah. Jikapun tidak, kontraktor dapat menyiapkan penawaran yang diperkirakan lebih rendah dari pesaingnya meskipun mungkin tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya. Kontraktor yang tidak jujur telah menyiapkan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan nantinya.

Kecurangan terjadi akibat perubahan kontrak dengan pelaksanaannya, antara lain melalui:

- ▲ Menawarkan nilai kontrak yang rendah untuk item yang diyakini akan dihilangkan dalam operasional kontrak dan menawarkan nilai yang tinggi untuk item yang akan dipertahankan dalam operasional kontrak.

- ▲ Menunda pekerjaan dalam kontrak yang mereka tahu akan diubah, kemudian mengaku telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga sehingga harus tetap dibayar.
- ▲ Mengganti material yang tercantum dalam kontrak dengan material yang lebih murah

PENGARUH STRUKTUR AUDIT INTERNAL

Penelitian James (2003) menunjukkan bahwa pengguna menganggap departemen audit internal yang melapor pada manajemen senior kurang mampu memberikan perlindungan terhadap adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan: (1) departemen *in house* yang melapor secara langsung kepada komite audit, dan (2) tim audit internal yang di-*outsource* yang melapor pada komite audit.

Persepsi pengguna bahwa struktur pelaporan audit internal mempengaruhi kecenderungan pencegahan, pendeteksian dan pelaporan terhadap kecurangan disebabkan pelaporan audit internal kepada manajemen memungkinkan manajemen untuk membatasi ruang lingkup prosedur audit yang dilakukan. Hal ini menunjukkan perlunya objektivitas fungsi internal audit melalui struktur pelaporan yang lebih kuat, yakni dengan tanggungjawab pengawasan fungsi internal audit secara langsung oleh komite audit.

Pengaturan pelaksana fungsi audit internal juga merupakan faktor yang cukup penting. Sarbanes Oxley Act melarang penugasan audit internal kepada kantor akuntan publik yang juga mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut, namun mengizinkan penugasan audit internal kepada kantor akuntan lainnya. Peningkatan keahlian audit melalui *outsourcing* ternyata tidak mempengaruhi kepercayaan terhadap fungsi audit internal karena tim audit eksternal dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan secara mendalam seperti yang dimiliki departemen audit internal perusahaan tersebut.

Hal lain yang banyak menjadi perhatian adalah tentang komposisi dewan direktur, khususnya terkait dengan keberadaan komite audit, yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Uzun et al (2004) juga menemukan bahwa struktur dewan direktur dan dewan komite mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Semakin tinggi proporsi

direktur independen dari luar perusahaan, semakin kecil pula kecenderungan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR TERHADAP FRAUD

PSA 32 (SA 316.05) menetapkan bahwa tanggungjawab auditor dalam kaitannya dengan kekeliruan (*error*) dan ketidakberesan (*irregularities*) adalah sebagai berikut:

- Menentukan risiko bahwa suatu kekeliruan dan ketidakberesan kemungkinan menyebabkan laporan keuangan berisi salah saji material.
- Berdasarkan penentuan ini, auditor harus merancang auditnya untuk memberikan keyakinan memadai bagi pendeteksian kekeliruan dan ketidakberesan.
- Melaksanakan audit dengan seksama dan tingkat skeptisme profesional yang semestinya dan menilai temuannya.

Terdapat dugaan bahwa jika hal tersebut dilaksanakan, maka akan banyak salah saji material yang akan ditemukan. Namun dalam SA 316.08 disebutkan bahwa karena pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep keyakinan memadai (*reasonable assurance*), maka laporan keuangan bukanlah suatu jaminan. Dengan demikian kegagalan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan tidak dengan sendirinya menunjukkan audit tidak dilakukan sesuai dengan standar auditing. Kadang-kadang terjadi, bahwa walaupun audit telah dirancang dan dilaksanakan dengan seksama, namun tidak dapat mendeteksi adanya kecurangan apabila manajemen, karyawan dan pihak ketiga bersekongkol untuk menyesatkan auditor dengan membuat dokumen dan catatan palsu.

Auditor berkewajiban untuk mengkomunikasikan setiap ketidakberesan material yang ditemukan selama audit kepada komite audit. Pada dasarnya, auditor tidak berkewajiban untuk mengungkapkan ketidakberesan material yang ditemukan kepada pihak-pihak di luar klien. Kode Etik Akuntan yang disusun IAI mengharuskan auditor untuk menjaga kerahasiaan kliennya. Biasanya auditor dapat mengungkapkan ketidakberesan hanya apabila hal itu berpengaruh terhadap pendapatnya atas laporan keuangan yang diperiksa. Namun dalam keadaan tertentu di bawah ini, auditor berkewajiban untuk mengungkapkan ketidakberesan yang diketahui dalam auditnya kepada pihak selain klien.

- a. Jika menerima pertanyaan dari auditor pengganti sesuai dengan SA Seksi 315 (PSA no. 16), Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti.
- b. Sebagai suatu jawaban atas permintaan pengadilan dalam suatu perkara pidana.

Jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji karena adanya kekeliruan dan ketidakberesan, maka auditor harus mendesak manajemen klien untuk merevisi laporan keuangan tersebut. Apabila hal ini dipatuhi oleh manajemen, maka auditor bisa menerbitkan laporan bentuk baku dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Namun jika laporan keuangan tidak direvisi, maka auditor hanya dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang telah dimodifikasi, maka auditor harus menarik diri dari penugasan dan mengkomunikasikan alasan penarikan dirinya kepada komite audit atau dewan komisaris atau pihak lain yang setara (Jusuf, 2001).

Fraud dalam perusahaan sebenarnya merupakan tanggungjawab manajemen untuk mencegah dan menghalanginya dengan menyusun suatu lingkungan pengendalian yang positif dan aktivitas pengendalian yang memadai. Namun demikian sesuai harapan masyarakat terhadap peran auditor, sekaligus adanya kemungkinan manajemen melakukan fraud untuk kepentingan pribadinya, maka auditor mempunyai tanggungjawab untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Namun demikian tanggung jawab ini sebenarnya masih terbatas untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara audit laporan keuangan dan fraud audit. Penugasan audit laporan keuangan bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Fraud audit dilakukan dalam penugasan terpisah dari audit atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan GAAS. Dalam fraud audit, seringkali telah terdapat dugaan terjadinya kecurangan atau suatu kecurangan memang telah ditemukan. Akuntan diberi penugasan untuk mengumpulkan bukti atau untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan proses peradilan atas kecurangan tersebut. Auditor tidak diminta untuk memberikan opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan (Jane Mancino, 1997 dalam Halim (2003))

STRATEGIC REASONING DALAM FRAUD

Zimbelman dan Wallaer (1999) dalam Zimbelman dan Wilks (2004) memberikan tiga tingkat pertimbangan strategik (*strategic reasoning*) dalam pelaksanaan audit:

- *Zero order reasoning*: auditor berasumsi bahwa perilaku klien tidak dipengaruhi oleh prosedur audit yang digunakan dan melakukan audit untuk memaksimalkan *trade off* dalam pertimbangan *cost-benefit*.
- *First order strategic reasoning*: auditor mempertimbangkan kondisi yang secara langsung mempengaruhi klien. Auditor berasumsi bahwa klien menggunakan *zero order reasoning* dan mengembangkan rencana audit yang mempertimbangkan motivasi klien.
- *Higher order strategic reasoning*: auditor menggunakan pertimbangan yang lebih kompleks, termasuk bagaimana manajemen mengantisipasi perilaku auditor.

Bloomfield (1995) berpendapat bahwa *strategic reasoning* lebih menantang karena adanya ketergantungan strategik, yaitu “tingkat dimana perubahan ekspektasi auditor tentang tindakan manajer mempengaruhi tindakan manajer”. Ketergantungan strategik sangat besar ketika respon terbaik setiap pemain berubah secara dramatis berdasarkan ekspektasi respon terbaik pemain lainnya. Bloomfield (1997) menyimpulkan bahwa auditor dan kliennya mengalami kesulitan untuk memprediksi respon terbaik pihak lain dalam kondisi ketergantungan strategik yang tinggi. Zimbelman dan Waller (1999) menemukan bahwa klien dipengaruhi oleh kondisi yang secara langsung mempengaruhi auditor - menunjukkan *adanya first order strategic reasoning*.

Wilks dan Zimbelman (2004) menyarankan agar standar auditing dibuat dengan mempertimbangkan model *game theory* yang dapat mendorong *strategic reasoning* sehingga akan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pendeteksian dan pencegahan fraud/kecurangan.

PENILAIAN FRAUD RISK

Selama bertahun-tahun, standar audit menuntut auditor untuk berfokus pada tanda/isyarat yang mengarah pada terjadinya fraud. SAS No. 53 (AICPA 1998), 82 (AICPA 1997) dan 99 (AICPA 2002), semuanya mengharuskan auditor untuk membuat

checklist untuk memastikan bahwa setiap tanda sudah dipertimbangkan dalam penilaian risiko audit.

Checklist mengasumsikan *first order reasoning* dan menuntut auditor untuk memperhatikan sikap (*attitude*), motivasi (*insentive*), dan kesempatan (*opportunity*) yang dimiliki manajemen, namun tidak berhasil dalam mempertimbangkan bagaimana manajemen dapat memanipulasi isyarat pada checklist tersebut. Kegagalan untuk memperhatikan respon manajemen ini menghalangi auditor untuk mendesain prosedur yang tidak dapat diantisipasi oleh manajemen. Mendesain prosedur yang “tidak terantisipasi” terasa menantang bagi auditor karena prosedur yang sudah ada dianggap sebagai praktik terbaik, yang paling tidak sebagiannya, mencerminkan keterbatasan pemahaman auditor. Jika auditor tidak melakukan *strategic reasoning*, mereka akan mengabaikan kesempatan untuk mengejutkan klien dengan bersifat tidak terprediksikan dalam hal sifat, waktu dan luas prosedur audit.

Wilks dan Zimbelman (2004) menjelaskan penemuan dan rekomendasinya terkait dengan penilaian risiko kecurangan, antara lain sebagai berikut:

- Auditor yang menggunakan daftar panjang *fraud cues* dan *fraud checklists* ternyata tidak akurat dalam penilaian risiko kecurangan;
- Auditor biasanya terlalu menitik beratkan pada tanda-tanda yang menunjukkan karakter manajemen meskipun tanda tersebut tidak akurat;
- Standar auditing harus didesain untuk mendorong auditor untuk memikirkan bagaimana manajemen dapat saja memanipulasi persepsi yang mereka dapatkan dari tanda-tanda kecurangan yang diperoleh.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN AUDIT

Wilks dan Zimbelman (2004) menjelaskan penemuan dan rekomendasinya terkait dengan perencanaan audit, antara lain sebagai berikut:

- Auditor harus mengembangkan strategi audit yang tidak dapat diprediksikan, khususnya terkait dengan sifat bukti yang dimiliki;
- Rencana audit lebih dapat diperkirakan dan bersifat kurang efektif ketika auditor menggunakan prosedur berdasarkan audit sebelumnya atau berdasarkan program audit standar;

- Standar audit seharusnya menuntut auditor untuk melakukan *strategic reasoning* dengan memperhatikan jenis kecurangan manajemen yang mungkin dilakukan dan bagaimana kecurangan ini berusaha disembunyikan dari proses audit;
- Tujuan standar audit harus mampu mendorong auditor untuk mengumpulkan bukti audit baru yang tidak biasa ataupun bersifat random agar tidak dapat dengan mudah diantisipasi oleh manajemen.

Adapun temuan dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan audit, meliputi:

- Pembelajaran dari pengalaman audit merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan strategi audit dengan efektif;
- Auditor seringkali kurang sensitif terhadap bukti baru terkait dengan risiko kecurangan dan dapat lebih efektif belajar dari interaksi mereka dengan klien;
- Standar audit dapat meningkatkan pembelajaran melalui kegiatan seperti pendokumentasian dan pengkomunikasian interaksi mereka dengan manajemen.

MENCEGAH TERJADINYA FRAUD

Menurut Joseph T. Wells, semua kejahatan terjadi sebagai kombinasi dari motivasi dan kesempatan.

- Untuk mengurangi motivasi berbuat kecurangan, pemilik dan manajer perusahaan harus:
 - a. Menyediakan lingkungan kerja yang etis dan kepemimpinan yang menunjukkan perilaku etis dalam semua aktivitas bisnis;
 - b. Memperlakukan karyawan dengan baik;
 - c. Mendengarkan dan menanggapi keluhan dan masalah yang disampaikan karyawan, khususnya mereka yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan atau mendiskusikan masalah kesulitan keuangan.
- Untuk mengurangi persepsi karyawan tentang adanya kesempatan melakukan kecurangan, pemilik dan manajer dapat mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa “seseorang sedang mengawasi”. Jika memungkinkan, minta akuntan eksternal untuk memeriksa pembukuan. Buatlah kebijakan perusahaan tentang kecurangan, konsekuensi pelanggaran serta menerapkan hukuman tersebut jika ditemukan pelanggaran.

Mungkin tidak ada cara yang dapat mencegah semua tindak kecurangan, apalagi jika sudah melibatkan kolusi antar karyawan. Namun, ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan:

- ✓ Untuk mengamankan aset perusahaan, sebaiknya diadakan program pelatihan untuk mendidik karyawan tentang pencegahan kecurangan dalam wilayah tanggungjawab mereka dan mengevaluasi pengendalian internal secara teratur untuk menilai keefektifannya.
- ✓ Melakukan pemisahan tugas sebagai bagian terpenting dalam pengendalian internal, yakni dengan memisahkan fungsi pencatatan, pelaksanaan dan penyimpanan.
- ✓ Jika memungkinkan, gunakan suatu sistem tunggal untuk mencatat semua transaksi bisnis. Penggunaan sistem berganda dapat menimbulkan transaksi mudah mengalami masalah melalui celah-celah yang muncul dalam sistem tersebut.
- ✓ Perusahaan harus belajar untuk mengidentifikasi *trends* yang tidak biasa/menyimpang sebagai indikasi adanya masalah. Jika mungkin, perusahaan dapat menyewa akuntan eksternal secara periodik untuk memeriksa ketidakwajaran pencatatan. *Review* dengan menggunakan prosedur analitis juga dapat menjadi alternatif audit dalam mengidentifikasi *trends* yang tidak biasa atau tidak wajar.
- ✓ Menyediakan sarana yang dapat digunakan karyawan untuk melaporkan kecurigaan adanya kecurangan tanpa harus diketahui identitasnya, misal melalui hotline etis perusahaan.

PENUTUP

Dengan banyaknya kasus kecurangan yang tidak dapat ditemukan auditor pada laporan-laporan keuangan yang cukup dikenal masyarakat luas, maka profesi ini mendapat tekanan kuat dari masyarakat untuk memperbaiki kinerjanya dalam masalah ini. Sorotan utama pada profesi ini adalah agar melakukan analisa yang lebih cermat mengenai kegagalan audit dengan menekankan pada: (1) membuat pedoman yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen, dan (2) merumuskan prosedur audit tambahan yang perlu

dilakukan jika faktor-faktor tersebut dijumpai dalam suatu audit (Jusuf, 2001). Auditor hendaknya terus meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam pendeteksian *fraud*, antara lain melalui *strategic reasoning* dalam penilaian risiko audit, perencanaan dan pelaksanaan audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Asare, Stephen K. dan Arnold M. Wright. 2004. The Effectiveness of Alternative Risk Assessment and Program Planning Tools in Fraud Setting. *Contemporary Accounting Research*, Vol.21, No.2, hal. 325-352.
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
- James, Kevin L. The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention. *Accounting Horizon*, Vol. 17, No.4, hal. 315-327.
- Jusuf, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Buku 1. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Kaplan, Richard L. 2004. The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients. *The Journal of Corporation Law*, Winter, hal. 363-383.
- Noel, James dan Evelyn Patterson. 2003. Audit Strategies and Multiple Fraud Opportunities of Misreporting and Defalcation. *Contemporary Accounting Research*, Vol 20 No.3, hal. 523-549
- Uzun, Hatice, Samuel H. Szewczyk dan Raj Varma. 2002. Board Composition and Corporate Fraud. *Financial Analyst Journal*, Mei/Juni, hal. 33-43.
- Viton, Patrice L.2003. Creating Fraud Awareness. *SAM Advanced Management Journal*. Summer , hal. 20-27 and 43.
- Wilks, T. Jeffrey dan Mark F. Zimbelman. 224. Using Game Theory and Strategic Reasoning Concepts to Prevent and detect Fraud. *Accounting Horizon*, Vol.18, No.3, hal. 173-184.
- Zimbelman, Mark F. dan T. Jeffrey Wilks. 2004. Decomposition of Fraud Risk Assessments and Auditors' Sensitivity to Fraud Cues. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 21, No. 3, hal. 719-745.